

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Jaksa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi putusan MA nomor 793K/PID.SUS/2009. Selain itu juga ditujukan untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi Jaksa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi putusan MA nomor 793K/PID.SUS/2009.

Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder pada awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau lapangan. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Ungaran.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh BG dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 793K/PID.SUS/2009 diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam menangani kasus ini, Jaksa berperan sebagai Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan pada hukuman yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi dan denda atau uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa. Selain itu, beberapa kendala yang dialami oleh Jaksa dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh BG yaitu bukti-bukti yang diajukan tidak kuat, saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh penyidik tidak hadir dalam persidangan, terdakwa melarikan diri dan ditetapkan dalam DPO selama kurang lebih tiga tahun. Untuk mengatasi kendala yang terjadi tersebut, Pengadilan bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan mengenai pencarian Terdakwa dan mengenai saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan. Tim penyidik mencari bukti lebih untuk memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan BG.

Kata Kunci : Peran Jaksa, Tindak Pidana, Korupsi, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the prosecutor in handling corruption cases in the Supreme Court decision number 793K/PID.SUS/2009. Other than, that it's also intended to find out the obstacles and solutions of the Prosecutor in handling cases of corruption verdicts MA number 793K/PID.SUS/2009.

In order to achieve the purpose of the study is done by using the method of juridical sociological, namely legal research using secondary data at first, followed by primary data or field. This study took place in the district court of Ungaran.

The results of this study state that cases of criminal acts of corruption committed by BG with the decision MA number 793K/PID.SUS/2009 are subject to criminal sanctions in article 2 paragraph 1 jo. 18 of Law number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption as amended by Law number 20 of 2001 concerning amendments to Law number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption in article 55 paragraph 1 to 1 of the criminal code. In handling this cases, Prosecutor act as public prosecutor. The public prosecutor prosecuted the sentence set by the high court and fines or substitute money to be paid by the defendant. In addition, several obstacles experinced by Prosecutor in handling cases of corruption committed by BG, namely the evidence submitted is not strong, witnesses were not present at the trial, the defendant fled for three years. To overcome the obstacles, the court collaborated and coordinated with the police and Prosecutors regarding witnesss who were not present at the hearing. The investigating team sought more evidence to strenghthen the suspicion of a criminal act of corruption by BG.

Keywords : Roles, Prosecutor, Criminal Act, Corruption, Local Government.